

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

2.1. Agropolitan

2.1.1. Pengertian Agropolitan

Agropolitan merupakan teori yang diperkenalkan oleh Friedman dan Douglass (1975). Konsep ini muncul sebagai kritik dari teori sebelumnya (*trickle down effect*) dan konsep ini menjelaskan model agropolitan menawarkan suatu kerangka tata ruang yang dapat digunakan untuk membangun suatu daerah pedesaan yang berlandaskan pada gagasan pembangunan yang mengarah kepada kebutuhan manusia. Agropolitan merupakan suatu pergerakan secara langsung masyarakat lokal dalam pembangunan dan pertumbuhan berdasarkan kegiatan atau aktivitas masyarakat pedesaan, pertanian dan sumberdaya (Safariyah dalam Roidah,2017). Agropolitan terdiri atas dua kata, yaitu Agro (pertanian) dan politan (kota). Sehingga pengertian dari agropolitan adalah suatu kota pertanian yang mampu melayani, mendorong, menarik, tumbuh dan berkembang dalam suatu kegiatan pembangunan pertanian atau agribisnis di wilayah sekitarnya (Buku Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, yang diterbitkan Departemen Pertanian).

Selain itu, menurut Mahi (2014), agropolitan merupakan suatu konsep pembangunan wilayah berdasarkan partisipasi dan aspirasi masyarakat yang merupakan komponen sangat penting yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan aspek kehidupan sosial seperti pendidikan, kesehatan, seni-budaya, pemberdayaan kepemudaan, politik, pertahanan dan keamanan, kehidupan beragama dan kaum perempuan. Agropolitan merupakan model dari pembangunan yang menggunakan asas desentralisasi yaitu pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan harus setara dengan perkotaan yang digunakan dalam mendorong urbanisasi sehingga dapat

menanggulangi dampak negatif dari migrasi dari desa ke kota yang cenderung tak terkendali (Rustiadi,2004).

Menurut UU No.26 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 24, Kawasan Agropolitan merupakan suatu kawasan pedesaan yang memiliki pusat kegiatan yang memiliki fungsi sebagai sistem produksi suatu pertanian dan pengelolaan hasil dari sumber daya alam (SDA) yang ditunjukkan dengan adanya keterkaitan fungsional. Kawasan agropolitan adalah daerah pedesaan yang memiliki fasilitas seperti yang ada di perkotaan. Pengembangan Kawasan Agropolitan juga berkaitan dengan pembangunan dari suatu perekonomian berbasis pertanian yang dirancang dan dilaksanakan dengan cara mensinergikan berbagai potensi yang berguna untuk mendorong berkembangnya suatu sistem dan usaha agribisnis yang harapannya dapat berdaya saing, berkelanjutan, berbasis kerakyatan dan terdesentralisasi (Agropolitan, Teori dan Aplikasi).

2.1.2. Ciri-ciri, Syarat dan Kriteria Kawasan Agropolitan

Menurut Friedman dan Douglass (1974), kawasan agropolitan yang berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sebagian besar penduduk di kawasan agropolitan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian atau dapat disebut juga kegiatan agribisnis.
2. Kegiatan yang ada di kawasan tersebut sebagian besar merupakan kegiatan pertanian, biasanya kegiatan tersebut meliputi industri pengolahan pertanian, kegiatan jual-beli hasil pertanian, kegiatan perdagangan agribisnis seperti sarana pertanian, permodalan, dsb. Serta kegiatan seperti agrowisata maupun jasa pelayanan.
3. Hubungan kota dan daerah hinterland di kawasan agropolitan memiliki sifat yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
4. Masyarakat yang tinggal di kawasan agropolitan memiliki kesamaan dengan suasana yang ada di daerah perkotaan.

Menurut Mahi (2014), Kawasan agropolitan dapat dikatakan sebagai kawasan agropolitan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai perekonomian yang baik, sehingga daerah tersebut produktif dan dapat dikembangkan;
2. Mempunyai keterkaitan satu sama lain;
3. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku;
4. Memiliki produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif; dan
5. Memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal;

Selain itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 74 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kawasan agropolitan dapat dikatakan sebagai kawasan agropolitan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kawasan perdesaan yang dapat berkembang dengan berjalannya usaha agribisnis yang dapat dan mampu melayani kegiatan agribisnis yang ada di wilayah sekitarnya;
2. Kawasan perdesaan yang mempunyai kondisi geomorfologi, iklim dan topografi yang mendukung kegiatan agribisnis di kawasan agropolitan;
3. Kawasan perdesaan yang memiliki dukungan kelembagaan yang mengembangkan kegiatan agribisnis.

2.1.3. Tujuan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Adapun tujuan dari Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No.22 Thn.2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian atau agribisnis di wilayah pedesaan Kabupaten Pesawaran;
2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui kegiatan agribisnis
3. Menumbuh kembangkan lembaga ekonomi di pedesaan

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Mewujudkan tata ruang ideal antara kota dan desa.

2.1.4. Indikator Keberhasilan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Menurut Helmet dalam Kholifatun (2013), keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan dan kemampuan yang telah dilakukan untuk melewati, mencapai dan mengawasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Berdasarkan pendoman umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, indikator keberhasilan Pengembangan Kawasan Agropolitan antara lain:

1. Terdapat Investasi di bidang pertanian yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
2. Terdapat suatu Infrastruktur fisik, sosial maupun ekonomi didalam bidang pertanian;
3. Meningkatnya pendapatan atau penghasilan para petani melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian yang ditandai dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP);
4. Memiliki banyak lapangan pekerjaan baru;
5. Terdapat pertumbuhan dan perkembangan suatu kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas yang memiliki kualitas unggulan pertanian dalam skala industri;
6. Terdapat pengelolaan lahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
7. Meningkatnya kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ataupun stakeholder di kawasan agropolitan yang dapat berdaya saing.

Indikator keberhasilan Pengembangan Kawasan Agropolitan berdasarkan Laporan Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Kendal yang diukur meliputi :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat
2. Terdapat peningkatan kesempatan kerja
3. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4. Terdapat peningkatan sarana dan prasarana umum dan sosial

2.2. Partisipasi masyarakat

2.2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah proses, yaitu masyarakat diberikan hak dalam pengambilan keputusan dan masyarakat berkontribusi dalam pelaksanaan program yang bermanfaat untuk kegiatan program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Cohen dan Uphoff dalam Harahap,2001). Selain itu, menurut Mardikanto dalam Wahyuddin 2018, Partisipasi merupakan suatu keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki suatu kegiatan ataupun tindakan dalam kegiatan untuk mendapatkan manfaat. Partisipasi dalam arti lain adalah suatu kemauan masyarakat dalam mendukung secara mutlak program ataupun suatu proyek pemerintah yang telah dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah (Soemodiningrat dalam Kali, 2014).

Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI dalam Aan Suratno, 2017), partisipasi merupakan peran serta seseorang dalam suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, partisipasi dapat dikatakan sebagai keikutsertaan, kemauan, peran serta, keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mendukung suatu kegiatan yang dilakukan. Sedangkan, menurut Adisasmita (2006), partisipasi masyarakat adalah Pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat yang memiliki kemauan dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan.

Selanjutnya, menurut Conyers dalam Hadiwijoyo (2012), terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan maupun pengembangan kawasan, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat dalam memperoleh berbagai informasi mengenai kebutuhan, kondisi dan sikap masyarakat sekitar. Sehingga jika tidak adanya peran dari masyarakat sendiri, program yang telah dilaksanakan tidak akan optimal.

2. Masyarakat akan mempercayai suatu program pembangunan, jika masyarakat terlibat dalam setiap tahapan prosesnya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring. Dengan hal tersebut, masyarakat akan memiliki rasa tanggungjawab dalam memiliki terhadap program tersebut.
3. Masyarakat juga memiliki hak dalam ikut serta untuk menentukan dan merencanakan suatu perencanaan pengembangan suatu wilayah.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta dari masyarakat dalam kegiatan suatu kawasan atau daerah berdasarkan kemauan sekelompok masyarakat guna mendukung kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan atau pembangunan suatu daerah yang berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara. Partisipasi masyarakat juga berperan penting, karena dapat membantu pemerintah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya. Keberhasilan program pemerintah juga tidak luput dari partisipasi masyarakat, maka dari itu partisipasi masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan program yang diselenggarakan termasuk pelayanan publik.

2.2.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat yang digunakan menurut Hobbey dalam Jariyah (2014), dibagi menjadi tujuh tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi Manipulatif (*Manipulative Participation*) merupakan partisipasi dengan perwakilan dalam suatu organisasi atau kelompok dan bukan merupakan partisipasi individu.
2. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*) merupakan partisipasi tanpa adanya keterlibatan secara langsung dari masyarakat dan pada hal ini, masyarakat langsung menerima suatu keputusan dan dianggap terlibat didalam pembuatan keputusan.
3. Partisipasi Konsultasi (*Participation by Consultation*), adalah partisipasi dalam melakukan diskusi yang menghasilkan identifikasi suatu permasalahan dan mendapatkan aspirasi dari masyarakat.

4. Partisipasi untuk Insentif (*Participation for Material Incentives*), adalah partisipasi rakyat melalui sumber daya, misalnya suatu tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya.
5. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*), adalah partisipasi dilihat berdasarkan lembaga eksternal yang digunakan sebagai suatu tujuan akhir dalam mencapai target proyek.
6. Partisipasi Interaktif (*Interactive Participation*), adalah partisipasi rakyat dalam pengembangan perencanaan dan pembentukan suatu lembaga lokal.
7. Partisipasi Inisiatif (*Self-Mobilisation*), adalah partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar dalam melakukan perubahan sistem.

Selain partisipasi berdasarkan Hobbey (1996), penelitian juga melakukan penilaian tingkat partisipasi menurut Arnstein (1969). Penelitian menggunakan dua penilaian partisipasi tersebut, untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkatan partisipasi di daerah penelitian, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih baik. Menurut Arnstein (1969) partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tipologi tangga partisipasi, yaitu terdapat tiga kelompok tangga partisipasi masyarakat yaitu Tidak ada partisipasi (*Non Participation*), Tokenisme (*Degrees of Tokenism*) dan Kekuasaan Warga (*Citizen Power*) yang akan dijelaskan sebagai berikut :

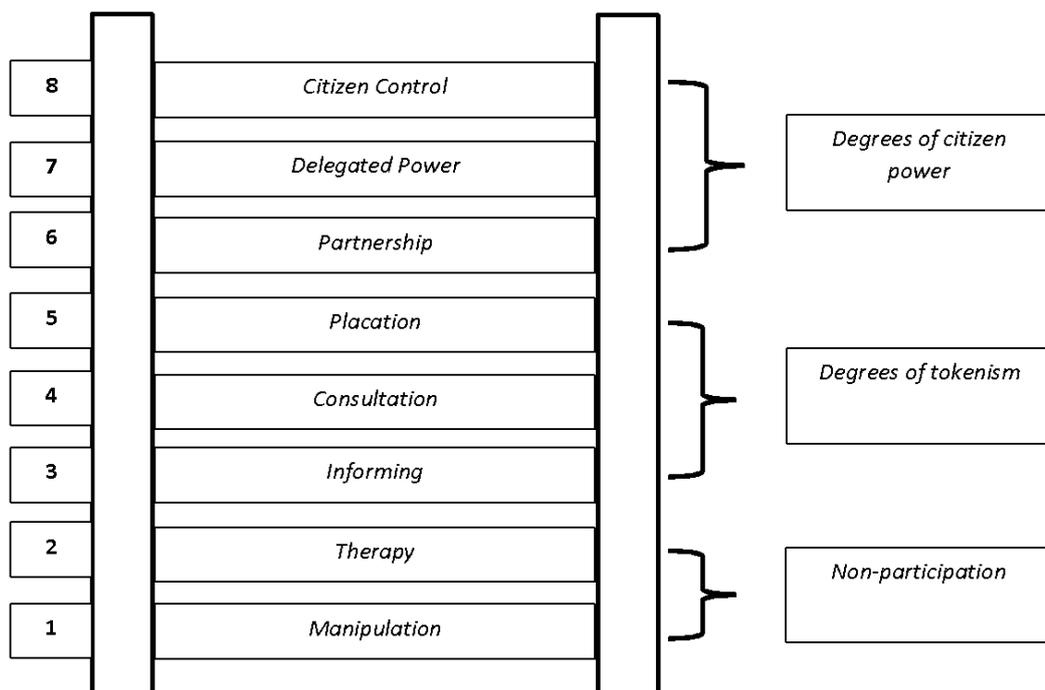
1. Tidak ada partisipasi (*Non Participation*) merupakan derajat partisipasi paling rendah, dalam tangga ini partisipasi masyarakat hanya sebagai suatu obyek dalam suatu kegiatan. Manipulasi dan terapi termasuk dalam derajat ini, berikut merupakan penjelasan keduanya :
 - a. Manipulasi (*Manipulation*) : Pada tangga partisipasi ini dapat diartikan relative tidak ada komunikasi apalagi dialog.
 - b. Terapi (*Therapy*) : Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.
2. Tokenisme (*Degrees of Tokenism*) merupakan derajat penghargaan dan mengalah. Pada derajat ini, masyarakat diberikan kesempatan dalam mengemukakan pendapat, namun keputusan yang diambil merupakan

sempuhnya keputusan pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada derajat ini terdapat tiga tangga partisipasi, yaitu informasi, konsultasi dan penentruman yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Informasi (*Information*) : Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal-balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feedback*).
 - b. Konsultasi (*Consultation*) : Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih ber-sifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.
 - c. Penentruman (*Placation*) : Pada ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan, namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.
3. Kekuasaan Warga (*Citizen Power*) merupakan derajat partisipasi yang paling tinggi, hal ini dikarenakan masyarakat sudah memiliki hak, wewenang dan tanggungjawab dalam menjalankan suatu program atau kegiatan yang ditandai dengan adanya keputusan keduabelah pihak sesuai kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.
- a. Kemitraan (*Partnership*) : Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
 - b. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*) : Pada tangga ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

- c. Pengendalian Warga (*Citizen Control*) : Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.



Sumber : *Tangga Partisipasi Arnstein, 1969*

Gambar 2.1. Tangga Partisipasi Menurut Arnstein (1969)

Sedangkan menurut Wilcox dalam Theresia (2014) menyatakan bahwa tingkat partisipasi ada lima tingkatan, yaitu:

1. Memberikan Informasi (*Information*).
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu masyarakat memberikan pendapat, namun masyarakat tidak terlibat ke dalam implementasi dari ide atau gagasan yang telah dibuat.

3. Pengambilan Keputusan Bersama (*Deciding Together*), yaitu suatu kegiatan dalam memberikan dukungan seperti ide, gagasan, atau pilihan dalam pengambilan keputusan.
4. Bertindak Bersama (*Acting Together*), yaitu masyarakat tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, namun terlibat dan menjalin suatu kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan Dukungan (*Supporting Independent Community Interest*), yaitu kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain dalam pengembangan agenda kegiatan.

Sementara menurut Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011), mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan yang dijelaskan dengan Tabel berikut :

Tabel II.1. Tingkatan Partisipasi Masyarakat menurut Peter Oakley

Tingkatan	Deskripsi
<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi.
<i>Consultation</i>	Masyarakat diberikan kesempatan dalam memberikan saran.
<i>Consensus Building</i>	Pada tingkat ini masyarakat berinteraksi dalam hal saling memahami posisi seperti saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok.
<i>Decision Making</i>	Pada tingkat ini terdapat negosiasi untuk mencerminkan derajat perbedaan yang akan terjadi dalam individu maupun kelompok.
<i>Risk-taking</i>	Merupakan proses yang menghasilkan keputusan, akan tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut suatu keuntungan, hambatan dan implikasi.
<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja secara sama dalam menuju hasil yang berkaitan.
<i>Self Management</i>	Interaksi dalam suatu proses untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

Sumber : Peter Oakley dalam Dwiningrum,2011

Berdasarkan tingkatan partisipasi masyarakat yang telah disebutkan, terdapat indikator-indikator partisipasi yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur suatu partisipasi masyarakat yang efektif dalam kegiatan pengembangan suatu kawasan.

2.2.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011), Bentuk partisipasi dapat dilihat dari bentuknya dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Partisipasi Fisik, yaitu partisipasi masyarakat dalam membangun atau menyelenggarakan suatu usaha.
2. Partisipasi non-fisik yaitu partisipasi masyarakat yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan keputusan.

Selain itu, menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011), bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi vertikal dan horizontal.

1. Partisipasi vertikal merupakan suatu partisipasi yang terjadi dalam kondisi masyarakat yang terlibat dalam suatu program, dalam hal ini masyarakat hanya berperan sebagai pengikut.
2. Partisipasi horizontal merupakan suatu partisipasi yang seluruh anggota kelompok masyarakat berpartisipasi secara setara dengan yang lainnya.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Wulandari (2019), bentuk partisipasi masyarakat memiliki 4 tahapan yaitu *participation of decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit* dan *participation in evaluation*. Bentuk partisipasi masyarakat dibedakan menjadi 4 jenis tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *Participation in decision making* atau partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang dibagi menjadi 3 bentuk partisipasi yaitu :
 - a. Bentuk partisipasi dalam keputusan (initiation).
 - b. Bentuk partisipasi saat pelaksanaan dalam pengambilan keputusan (ongoing).
 - c. Bentuk partisipasi pada saat pengambilan keputusan dalam operasional.

Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan berpendapat atau memberikan saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan pada tahap perencanaan.

2. *Participation in implementation* atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau

pengembangan berwujud kontribusi yang dibedakan menjadi 3 bentuk partisipasi, yaitu :

- a. Memberikan kontribusi dalam sumber daya (resource contribution).
 - b. Terlibat dalam koordinasi dan administrasi.
 - c. Memberikan kontribusi dalam program yang telah dibuat oleh masyarakat dan pemerintah (enlistment).
3. *Participation in benefit* atau partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran masyarakat dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah maupun masyarakat. Pada tahapan ini dibedakan menjadi 3 bentuk partisipasi, yaitu :
- a. Bentuk partisipasi dalam menikmati keuntungan materil (*material*).
 - b. Bentuk partisipasi dalam menikmati keuntungan sosial.
 - c. Bentuk partisipasi dalam keuntungan personal atau pribadi.
4. *Participation in evaluation* atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini, bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu evaluasi secara tidak langsung dan secara langsung.

Sedangkan menurut Huraerah dalam Widianti (2017), bentuk partisipasi masyarakat yaitu :

1. Partisipasi Buah Pikiran, yaitu partisipasi yang diberikan seseorang atau masyarakat dalam pertemuan atau rapat. Buah pikiran tersebut merupakan ide, saran maupun pendapat.
2. Partisipasi Tenaga, yaitu partisipasi yang diberikan seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan guna untuk perbaikan desa, mendukung pembangunan desa atau dapat berupa pertolongan bagi orang lain.
3. Partisipasi Harta Benda, yaitu partisipasi seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan berupa materi atau uang guna perbaikan desa, mendukung pembangunan desa atau dapat berupa pertolongan bagi orang lain.

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran, yaitu partisipasi seseorang atau masyarakat yang diberikan untuk mendorong kegiatan usaha atau industri yang mandiri.
5. Partisipasi Sosial, yaitu partisipasi seseorang atau masyarakat yang diberikan sebagai tanda keguyuban (kerukunan).

2.3. Sintesa Literatur

Kajian pustaka yang telah dilakukan bersumber berbagai macam literatur yang dijadikan peneliti sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Hasil dari kajian tersebut digunakan untuk menemukan variabel yang memiliki keterkaitan dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel II.2. Sintesa Literatur

No.	Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Penelitian	Output
1.	Tingkatan Partisipasi Masyarakat	Arnstein dalam Jariyah (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manipulasi (<i>Manipulation</i>) 2. Terapi (<i>Therapy</i>) 3. Informasi (<i>Information</i>) 4. Konsultasi (<i>Consultation</i>) 5. Perdamaian (<i>Placation</i>) 6. Kemitraan (<i>Partnership</i>) 7. Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>) 8. Pengendalian Warga (<i>Citizen Control</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manipulasi (<i>Manipulation</i>) 2. Terapi (<i>Therapy</i>) 3. Informasi (<i>Information</i>) 4. Konsultasi (<i>Consultation</i>) 5. Perdamaian (<i>Placation</i>) 6. Kemitraan (<i>Partnership</i>) 7. Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>) 8. Pengendalian Warga (<i>Citizen Control</i>) 	Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan
		Wilcox dalam Theresia (2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Informasi (<i>Information</i>) 2. Konsultasi (<i>Consultation</i>) 3. Pengambilan Keputusan Bersama (<i>Deciding Together</i>) 4. Bertindak Bersama (<i>Acting Together</i>) 5. Memberikan Dukungan (<i>Supporting Independent Community Interest</i>) 		

No.	Literatur	Sumber	Teori	Penyesuaian Penelitian	Output
		Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manipulasi (<i>Manipulation</i>) 2. Konsultasi (<i>Consultation</i>) 3. Pembangunan Konsensus (<i>Consensus building</i>) 4. Pengambilan keputusan (<i>Decision making</i>) 5. Pengambilan Resiko (<i>Risk-taking</i>) 6. Kemitraan (<i>Partnership</i>) 7. Manajemen Diri (<i>Self management</i>) 		
2.	Bentuk Partisipasi Masyarakat	<p>Basrowi dalam Dwiningrum (2011)</p> <p>Effendi dalam Astuti (2011),</p> <p>Cohen dan Uphoff (1980) dalam Dwiningrum (2011),</p> <p>Huraerah (2008) dalam Widianti (2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Fisik, 2. Partisipasi non-fisik <p>Partisipasi vertikal dan horizontal.</p> <p>Bentuk partisipasi berdasarkan jenis partisipasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan 2. Partisipasi dalam pelaksanaan 3. Partisipasi dalam kemanfaatan 4. Keikutsertaan dalam evaluasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Buah Pikiran 2. Partisipasi Tenaga 3. Partisipasi Harta Benda 4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran 5. Partisipasi Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap perencanaan 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap pelaksanaan 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap pemanfaatan 4. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap evaluasi 	Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan

Sumber : Analisa Peneliti, 2019

Tabel II.3. Keterangan Variabel

No.	Sasaran	Variabel	Keterangan
1.	Sasaran 1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Pada tangga partisipasi ini dapat diartikan relative tidak ada komunikasi apalagi dialog.
		Terapi (<i>Therapy</i>)	Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.
		Informasi (<i>Information</i>)	Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal-balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (<i>feedback</i>).
		Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjangkaran aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.
		Perdamaian (<i>Conciliation</i>)	Pada ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan, namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.
		Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
		Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Pada tangga ini pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.
		Pengendalian Warga (<i>Citizen Control</i>)	Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

No.	Sasaran	Variabel	Keterangan
2.	Sasaran 2	Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap perencanaan	Dalam bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perumusan atau proses perencanaan, masyarakat berpendapat atau memberikan saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan dan pemahaman masyarakat mengenai Pengembangan Kawasan Agropolitan
		Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap pelaksanaan	Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan yang berwujud kontribusi.: a. Memberikan kontribusi dalam sumber daya (resource contribution). b. Terlibat dalam koordinasi dan administrasi. c. Memberikan kontribusi dalam program yang telah dibuat oleh masyarakat dan pemerintah (enlistment).
		Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap pemanfaatan	Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan wujud peran masyarakat dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah maupun masyarakat. a. Bentuk partisipasi dalam menikmati keuntungan materil (<i>material</i>). b. Bentuk partisipasi dalam menikmati keuntungan sosial. c. Bentuk partisipasi dalam keuntungan personal atau pribadi.
		Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam tahap evaluasi	Keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Sumber : Analisa Peneliti, 2019